



PERNYATAAN SIKAP

DARURAT PEMBANGUNAN DESA

"DESA JANGAN TERUS DISURUH MENUNGGU"

Jember, 10 Agustus 2026

Hari ini kami datang membawa persoalan yang selama ini dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Banyak kebutuhan pembangunan yang belum selesai. Ada yang sudah lama disampaikan, ada yang berulang kali diusulkan, tetapi belum juga mendapatkan kepastian. Hal ini terjadi dikarenakan Pemerintah Pusat sedang fokus pada pembangunan dan operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang berdampak terhadap pemangkasan dana desa (DD) dari yang semula 1,5 Milyar hingga 3 Milyar Rupiah hari ini menjadi 300an juta di seluruh Desa di Indonesia.

Dari persoalan tersebut, bisa dikata bahwa Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa tidak bisa melakukan pembangunan infrastruktur seperti dulu lagi sebelum ada pemangkasan dana desa (DD). Mayoritas Kepala Desa hari ini menjerit tak berdaya ditengah efisensi besar-besaran yang terjadi. Banyak jalan rusak yang tidak bisa dibangun, banyak jalan yang masih gelap jika dimalam hari dan banyak jembatan ambruk hampir tidak diurus. Lagi-lagi korbannya adalah rakyat atau masyarakat pedesaan.

Kami paham pemerintah punya keterbatasan anggaran. Kami juga paham kebutuhan Kabupaten Jember bukan hanya satu atau dua. Tetapi kami ingin menyampaikan dengan jelas: keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan yang terus diulang setiap kali desa meminta kepastian pembangunan.

Desa juga bagian dari Kabupaten Jember. Masyarakat di desa juga membayar pajak, bekerja, bertani, berdagang, menyekolahkan anak, dan ikut menggerakkan ekonomi daerah. Kalau pembangunan di desa terus tertunda, yang paling merasakan adalah masyarakat.

Karena itu kami meminta Bupati Jember dan juga DPRD Jember tidak melihat persoalan ini sebagai persoalan biasa. Bagi kami, kondisi ini sudah mendesak.

Sikap PKDI dan Apdesi Jember

1. Kami meminta Bupati Jember turun tangan langsung dalam percepatan pembangunan desa, dan memastikan pembangunan desa benar-benar menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten — bukan sekadar usulan yang berpindah dari satu dokumen ke dokumen lain.
2. Kami meminta Pemerintah Kabupaten menentukan kebutuhan desa yang memang harus segera ditangani, dengan melibatkan pemerintah desa yang setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat dan mengetahui kondisi di lapangan.

3. Kami meminta ada kepastian: mana yang akan dikerjakan, kapan dilaksanakan, dan bagaimana penyelesaiannya. Jangan sampai desa terus diminta bersabar tanpa kejelasan.
4. Kami meminta Pemerintah Kabupaten Jember memaksimalkan kemampuan anggaran yang ada dan mencari seluruh sumber pendanaan yang memungkinkan untuk mempercepat pembangunan.
5. Apabila anggaran yang tersedia memang belum cukup, jangan berhenti pada kalimat "anggaran terbatas". Pemerintah harus mencari jalan lain yang sah, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana caranya dan pilihan apa yang akan ditempuh menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember bersama DPRD.
6. Kami meminta DPRD Kabupaten Jember ikut memastikan persoalan pembangunan desa ini benar-benar mendapat jalan keluar.

Kami datang bukan untuk mengajari pemerintah bagaimana mengatur keuangan daerah, dan kami juga tidak meminta pemerintah mengambil keputusan secara gegabah. Kami hanya tidak ingin setiap kebutuhan pembangunan yang mendesak selalu berakhir pada jawaban yang sama: belum ada anggaran.

Kalau masih ada jalan yang sah, tempuh. Kalau ada pilihan yang bisa dipertanggungjawabkan, kaji. Yang kami minta sederhana: pemerintah jangan berhenti mencari solusi ketika kebutuhan masyarakat sudah mendesak.

Kami Meminta Bupati Hadir

Yang kami harapkan dari Bupati bukan hanya penjelasan tentang keterbatasan, tetapi keputusan dan arah penyelesaian. Masyarakat desa tidak bertanya soal istilah anggaran. Masyarakat bertanya: kapan dibangun? Itu yang setiap hari kami hadapi di desa.

Melalui hearing ini kami meminta Bupati Jember hadir langsung, memimpin penyelesaian persoalan ini, dan memastikan perangkat daerah benar-benar bekerja mencari jalan keluar. PKDI dan APDESI akan mengawal tindak lanjut dari pertemuan ini. Kami tidak ingin hearing ini hanya berakhir dengan aspirasi diterima dan didengar, tetapi harus ada langkah nyata bagi pembangunan desa.

Beberapa yang menjadi permintaan kongkrit dari Kepala Desa Kabupaten Jember di tengah efisiensi besar-besaran adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur dan Penerangan jalan yang merata di 226 Desa di Kabupaten Jember
2. Adanya Bantuan Keuangan Desa ataupun yang sejenis untuk pemberdayaan masyarakat desa
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana BGH jangan dipangkas dan kalau perlu dinaikkan.
4. Ambulan Desa segera serahkan kepada semua pemerintah desa
5. Setiap program strategis pemerintah kabupaten Jember seperti Homecare, Ketahanan pangan dan lain-lain wajib melibatkan pemerintah desa

Desa tidak meminta janji. Desa meminta kepastian. Kalau ada jalan yang sah, pemerintah harus berani menempuhnya.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan.

Jember, 10 Agustus 2026

DPC PKDI Kabupaten Jember

DPC APDESI Kabupaten Jember